

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA
SIPITUHUTA KECAMATAN POLLUNG
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

SKRIPSI

OLEH:

TULUS LUMBAN GAOL

198520028



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/23

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA
SIPITUHUTA KECAMATAN POLLUNG
KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

TULUS LUMBAN GAOL

198520028

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sipituhuta
Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang
Hasundutan

Nama Mahasiswa : Tulus Lumban Gaol

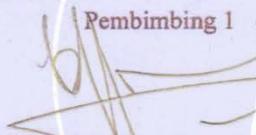
Npm : 198520028

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. Bahrun Jamil, MAP


Beltah Mamero S.I.P., M.P.A.

Mengetahui

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik



Dr. Effiani Juliana Hasibuan, M.Si



Khasanisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya Bersedia Menerima Sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 19 September 2023



Tulus Lumban Gaol

198520028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Citivasi akademik Universitas Medan Area , saya yang bertanda tangan
dibawah ini

Nama : Tulus Lumban Gaol
NPM : 198520028
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-free right)** atas Karya Ilmiah saya yang berjudul: Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan Gak bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan ,mengalih media/format ,mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*),merawat, dan memublikasikan skripsi/tesis saya selama saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya



Medan, 19 September 2023

Tulus Lumban Gaol

ABSTRAK

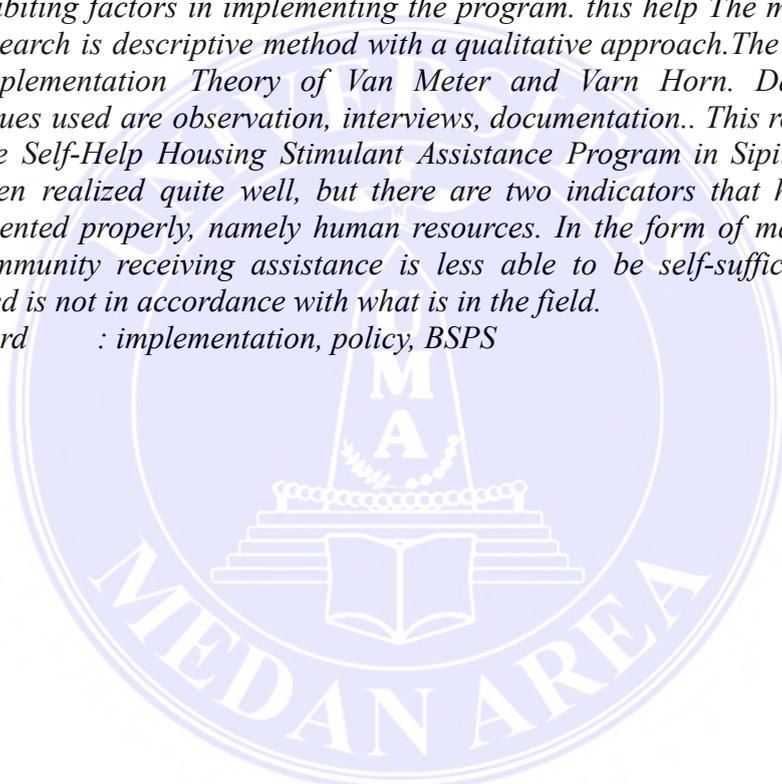
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Program yang dibuat Pemerintah Melalui Kementerian PUPR yang ditujukan kepada Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh bantuan rumah yang layak untuk di huni. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat/mendeskripsikan bagaimana proses berjalanya Program BSPS yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas PKP) di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung , Kabupaten Humbang Hasundutan dan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat didalam pelaksanaan program bantuan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Implementasi dari Varn Meter dan Varn Horn. Adapun Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sipituhuta ini sudah terealisasi cukup baik namun ada dua indikator yang belum terealisasi dengan baik yakni Sumber Daya berupa Materi (Dana) Masyarakat Penerima bantuan kurang mampu untuk berswadaya, Data yang diberikan tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

ABSTRACT

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is a program created by the Government through the Ministry of PUPR aimed at low-income people (MBR) who have limited purchasing power so that they receive support from the government to obtain decent housing assistance. The purpose of this research is to see/describe how the BSPS Program is running, which is carried out by the Housing and Settlement Area Service (PKP Service) in Sipituhuta Village, Pollung District, Humbang Hasundutan Regency and to find out what are the inhibiting factors in implementing the program. this help The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The theory used is the Implementation Theory of Van Meter and Varn Horn. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation.. This research shows that the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Sipituhuta Village has been realized quite well, but there are two indicators that have not been implemented properly, namely human resources. In the form of material (funds) the community receiving assistance is less able to be self-sufficient, the data provided is not in accordance with what is in the field.

Key word : implementation, policy, BSPS



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Tulus Lumban Gaol, anak dari Umar Lumban Gaol dan Rindu Tamba, lahir pada 30 Oktober 2001 di Marade. Penulis merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 173416 Pollung. Selanjutnya pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Doloksanggul, kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 POLLUNG. Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. proposal skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial dan Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul Skripsi ini adalah **“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana satu (S1) Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Terwujudnya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah berpartisipasi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan , M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP Selaku Dosen Pembimbing 1 saya yang selalu sabar dan sedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Beltahmamero Simamora S.IP , MPA selaku dosen pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya selama penyusunan skripsi ini
5. Ibu Chairika Nasution S,AP ,M.AP Selaku Sekretaris penulis Skripsi
6. Ibu Khairunisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area
7. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Terkhusus Kepada Orang Tua Tercinta yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan senantiasa memberi dukungan,motivasi dan doa serta materi yang selalu diusahakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada Saudari saya Serdita Lumban Gaol, Lamtiur Lumban Gaol, Maisarah Lumban Gaol, Latifah Lumban Gaol, Asri Ayu Lumban Gaol yang selalu memberikan semangat dan suport kepada penulis.
10. Kepada Sudara saya Fery Hidayah Lumban Gaol yang selalu memberikan suport dan dukungan kepada penulis
11. Keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti demi selesainya skripsi ini
12. Kepada Pengawas Tata Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu ibu Fitri Atmanegara Sinaga,S.T.,M.T
13. Kepada Kepala Desa Sipituhuta yang berkenan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan sekaligus sebagai informan penelitian.

14. Sekretaris Desa Sipituhuta yang berkenan membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data dan dokumen terkait penelitian ini.
15. Semua Masyarakat yang telah membantu peneliti memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
16. Kepada teman-teman satu kos dan teman seperjuangan di Kos Kambuna Yosafat Sihotang, Josua Sinurat , Niko Samosir yang selalu memberikan suport dan dukungan kepada penulis
17. Seluruh teman-teman seperjuangan (Mahasiswa Administrasi Publik A1) yang selalu memberikan semangat dan doanya.

Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini dimana skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu , penulis mengharapkan koreksi dan saran yang bersifat membangun sehingga dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya akan lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Medan, September 2023

Penulis

Tulus Lumban Gaol

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Implementasi Kebijakan Publik	6
2.2 Kebijakan Publik	7
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	7
2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan	10
2.2.3 Karakteristik Kebijakan Publik	12
2.3 Analisis Kebijakan	13
2.3.1 Pengertian Kebijakan	13
2.3.2 Analisis Kebijakan Spesifik	17
2.4 Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS)	21
2.4.1 Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	23
2.4.2 Persyaratan Penerima Bantuan	23
2.4.3 Hukum Yang Mengatur tentang program BSPS	24
2.5 Penelitian Terdahulu	24
2.6 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Metode Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	28
3.3 Waktu Penelitian	30
3.4 Informan Kunci	30
3.5 Sumber Data	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6.1 Observasi	31

3.6.2 Wawancara	32
3.6.3 Dokumentasi	33
3.7 Teknik Analisis Data	33
3.7.1 Pengumpulan Data	34
3.7.2 Reduksi Data	34
3.7.3 Penyajian Data	35
3.7.4 Penerikan Kesimpulan dan Verifikasi	36
BAB IV PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Sipituhuta	39
4.1.3 Tugas Pokok Pemerintahan Desa Sipituhuta	40
4.1.4 Visi dan Misi Desa Sipituhuta	45
4.2 Pembahasan	46
4.3 Faktor-Faktor Penghambat program Bantuan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68



Daftar Tabel

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

25

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

29

Tabel 4.1 Sarana Pendidikan

39

Tabel 4.1 Keselamatan Bangunan

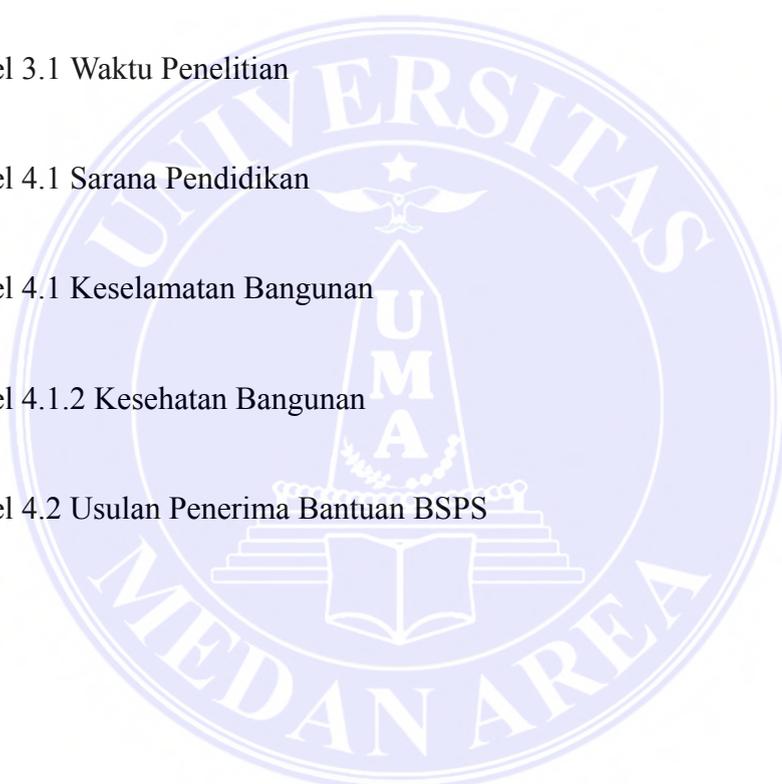
47

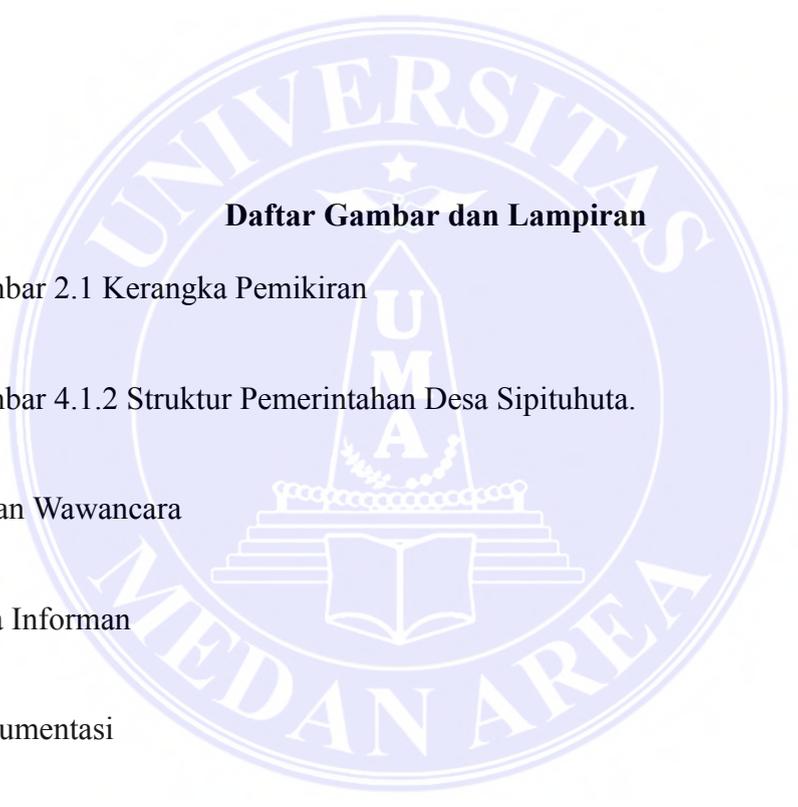
Tabel 4.1.2 Kesehatan Bangunan

47

Tabel 4.2 Usulan Penerima Bantuan BSPS

53





Daftar Gambar dan Lampiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Sipituhuta.	40
Bagan Wawancara	68
Data Informan	80
Dokumentasi	83



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya rumah merupakan suatu kebutuhan primer setelah pangan dan sandang terpenuhi. Setelah manusia memenuhi kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok manusia, baru manusia memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Selain sebagai pelindung dari segala cuaca dan gangguan alam juga makhluk lainnya rumah juga memiliki fungsi yaitu sebagai pusat pendidikan keluarga, pusat persemaian budaya dan sebagai peningkatan kualitas generasi muda suatu bangsa. Kebutuhan pokok terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. teori Hierarki kebutuhan menurut Maslow (1943) mengemukakan kebutuhan manusia

yang harus terpenuhi ada lima tingkatan diantaranya:1.Kebutuhan Fisiologis Meliputi: sandang, pangan, papan seperti makan,minum,perumahan,tidur,dan lain sebagainya 2.Kebutuhan rasa aman 3.Kebutuhan Sosial 4.Kebutuhan Penghargaan,Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati ,dihargai dan diapresiasi oleh seseorang pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang 5.Kebutuhan aktualisasi diriAktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu keperluan dasar manusia yang juga mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pusat pendidikan pada keluarga,persemaian budaya,dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman ,baik perkotaan maupun pedesaan,yang dilengkapi dengan prasarana,sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan, Pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun hak dasar tersebut saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan keperluan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi rumah tangga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan

perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. salah satu upaya pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) yaitu dengan memberikan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebagai upaya untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup agar lebih baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang bantuan stimulan perumahan Swadaya merupakan fasilitas dari pemerintah berupa bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. sedangkan perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Laju pertumbuhan Ekonomi yang pesat dan meningkatnya jumlah penduduk harus diikuti oleh peningkatan kualitas daya beli dan kemampuan masyarakat. Desa Sipituhuta adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan pollung, Kabupaten Humbang yang pertumbuhan ekonominya di bidang Agrari, dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani baik petani kopi maupun sayur-sayuran .meningkatnya jumlah penduduk harus diikuti dengan kualitas hidup penduduk tersebut,mulai dari peningkatan kebutuhan pokok sandang,pangan dan papan. Meningkatnya harga bahan- bahan pokok dan rendahnya pendapatan di desa Sipituhuta Mengakibatkan banyak Masyarakat di Desa ini tidak dapat melakukan pembangunan untuk kebutuhan papanya dan harus tinggal di tempat yang tidak layak huni.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Humbang Hasundutan telah terprogram pada tahun 2021 tahap I (Pertama) Kepada 200 KK Masyarakat Humbang Hasundutan. Bantuan ini di serahkan dalam bentuk tabungan pada acara serah terima buku tabungan dengan jumlah Rp.20.000.000/kk dengan rincian Rp.17.500.000 untuk pembelian bahan bangunan dan Rp.2.500.000 untuk upah tukang.

Menurut Hasil Observasi dari berbagai pihak Masyarakat di Desa Sipituhuta mengatkan bahwa target dan tujuan dari program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum tepat sasaran dikarenakan Pendataan dari pemerintah yang belum Maksimal, persyaratan untuk masyarakat yang layak menerima bantuan BSPS masih bisa direayasa, Kurangnya Keadilan Permerintah Desa kepada masyarakat, sistem kekeluargaan antara pemerintah desa dan masyarakat yang memprioritaskan orang terdekat dibandingkan dengan orang yang lebih membutuhkan, Implemantor baik dari dinas Perkim maupun fasilitator belum mampu mengajak masyarakat sadar dan paham dengan konsep dari BSPS walaupun sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya.

Dari Latar Belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan Latar Belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak huni di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa Faktor Penghambat Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak huni di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya di Desa Sipituhuta

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, juga dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan bidang yang sama.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau alternatif untuk

melakukan pembenahan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS)ini.

Dan juga peneliti diharapkan dapat memberikan Informasi atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Khususnya Desa Supituhuta dalam melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sehingga tercapainya program yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.



2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Memiliki Makna Pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Implementasi adalah tahapan pelaksanaan dari suatu proses kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (Budi Winarno, 2014; 148) implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang itu ditetapkan yang memberikan otoritas program,

kebijakan keuntungan (benefit) , atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Istilah Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Varn Horn dalam (Anggara,2014.232) Implementasi Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu / pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Van Meter dan Varn Horn (dalam Leo Agustino, Mendefenisikan Implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan dalam mengamnbil keputusan sebelumnya . tindakan tersebut meliputi upaya untuk mengubah keputusan menjadi upaya operasional dalam jangka waktu tertentu, dan dalam konteks upaya terus menerus agar mencapai perubahan besar yang dimana harus ditentukan oleh organisasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditemukan.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Publik sangat berkaitan erat dengan administrasi Negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas. Kebijakan menurut Laswell dan Kaplan yang dikutip oleh said Zainal Abidin adlaah sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenan dengan tujuan ,nilai dan praktik.

Smith dan Larimer(2009) mungkin benar ketika mereka menyatakan *“there is not a field of public policy studies, there are fiels plural of public policy*

studies” (ini bukan bidang studi kebijakan publik, ada bidang jamak dari studi kebijakan publik).berdasarkan perspektif ini,baik konten maupun konteks kebijakan publik itu akan selalu dianggap sebagai bersifat plural,dan karena itu masalah kebijakan-kebijakan (*policy problems*) pun sebagai sebuah *academic enquiry*(permintaan akademik) tidak hanya menjadi minat perhatian ahli dari disiplin ilmu tertentu yang mempelajari atau mendekatinya secara monodisiplin. Itu pula sebabnya, sudah sejak lama,masalah-masalah kebijakan itu menjadi arena pergumulan para ahli dari bermacam disiplin ilmu sosial yang sengaja mengorientasikan diri pada kebijakan (*policy oriented*) dan yang mempelajari atau menelitinya secara interdisiplin(*interdisciplinary approach*).Di lingkup Ilmu-ilmu sosial sendiri beragam disiplin, baik arah perbincangan maupun penelitiannya untuk sebagian atau seluruhnya berorientasi pada isu-isu kebijakan itu.Misalnya,Ilmu politik, Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi Pembangunan, Administrasi Publik, Antropologi Sosial, Sosio Linguistik, Komunikasi Pembangunan, Ekonomi Kelembagaan, Ekonomi Politik,dan masih banyak lagi. Tidak mengherankan jika situasi seperti ini menyebabkan para ahli yang berasal dari beragam disiplin Ilmu Sosial itu saat membicarakan dan menganalisis isu kebijakan tertentu , Kemudian tidak lupa mengusung defenisi berbeda-beda yang sekiranya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.dalam kepustakaan ilmu-ilmu kebijakan(*policy science*) yang adakalanya disebut sebagai studi-studi kebijakan (*policy studies*) yang hingga kini sudah mencapai ribuan jumlahnya,dapat kita temukan berbagai defenisi mengenai kebijaka publik.Namun, temukan berbagai defenisi mengenai Kebijakan Publik.Namun dengan berbagai banyak defenisi itu, memang harus diakui pula bahwa semakin

dirasa sulit untuk mendapatkan rumusan atau defenisi yang benar-benar memuaskan, baik lantaran sifatnya yang terlalu luas,kabur,atau tidak terlalu spesifik dan operasional.Karena itulah, bagi mereka yang sedang mempelajari kebijakan publik,sangat dianjurkan untuk pandai-pandai memilih defenisi yang tepat, yang kira-kira cocok dengan isu atau persoalan kebijakan yang sedang dipikirkan atau dibahasanya.

Berikut ini contoh berbagai macam defenisi tersebut. Contoh-contoh defenisi kebijakan publik yang kendati cukup akurat dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan langsung dengan Kebijakan publik, tetapi cakupanya terlalu luas, ialah defenisi Eystone (1971:18) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah *“the realitionsip of govermental unit to its environment”*(antar hubungan yang berlangsung diantara unit /satuan pemerintahan dengan lingkunganya). Demikian pula defenisi yang pernah disodorkan oleh Wilson (2006:154) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“the actions,objectives,and pronouncements of goverments on particular matters,the steps they take (or fail to take) to implement them , and the explantions they give for what happens”(tindakan-tindakan,tujuan-tujuan,dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu,langkah-langkah yang telah diambil(gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi.

Chief J.O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefenisikan kebijakan publik sebagai” *an santioned course of action adressed to a particular*

problem or group of related problems that affect society at large”(Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Dari perbincangan tentang defenisi kebijakan publik diatas,kita kita menyadari bahwa semua pembuatan kebijakan publik (*publicy policymaking*) itu akan selalu melibatkan pemerintah,dengan cara tertentu.Gerston (2002) ,kiranya tidak keliru ketika ia dalam kaitan ini menegaskan bahwa” *all public policymaking involves goverment in some way*”(semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara).itulah sebabnya dalam bidang apapun dan untuk merealisasikan tujuan apapun, akan diberi makna sebagai “ Kebijakan Publik”jika sebagian atau seluruhnya digagas, atau dikembangkan,dirumuskan ,atau dibuat oleh instansi-instansi,serta melibatkan (langsung atau tak langsung) pejabat-pejabat pemerintah.

2.2.2 Ciri-Ciri Kebijakan

Kebijakam publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas(*a unique activity*),dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan,didesain,dirumuskan,dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton(1953:1965) disebut sebagi orang-orang yang memiliki otoritas(*public authorities*) dalam sistem politik. Dalam sistem politik/masyarakat

tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki dan sejenisnya. Mereka inilah, masih menurut pendapat Easton, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik dari sistem politik, dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik.

Penjelasan yang baru dikemukakan di atas ternyata membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik, yang secara rinci akan dijelaskan di bawah ini.

- 1) Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan politik, semisal kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan (*by planed*).
- 2) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih

detail, bersangkutan paut dengan proses Implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuanya.

- 3) Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
- 4) Kebijakan publik mungkin bersifat positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

Dengan kata lain, yang perlu ditegaskan di sini, pemerintah dapat saja menempuh suatu kebijakan yang sangat liberal, kebijakan pembiaran, atau cuci tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor kehidupan, dan menyerahkan semua urusan tersebut sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Hakikat kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tersebut, akan dapat dapat kita pahami dengan lebih baik lagi, apabila kebijakan itu kita perinci lebih lanjut kedalam beberapa kategori berikut ini.

- *Policy demands* (Tuntutan Kebijakan)

- *Policy decisions*(Keputusan Kebijakan)
- *Policy statements*(Pernyataan Kebijakan)
- *Policy outputs*(Keluaran Kebijakan)
- *Policy outcomes*(Hasil akhir Kebijakan)

2.2.3 Karakteristik Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik akan menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (dalam Abidin 2006:41) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik adalah perilaku yang bertujuan berorientasi pada tujuan dari pada perilaku atau kebetulan.
2. Kebijakan publik terdiri dari rangkaian peraturan, bukan keputusan atau tindakan yang terpisah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
3. Kebijakan disebut sebagai sesuatu hal yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan segera dilakukan.
4. Suatu kebijakan dapat bersifat larangan atau dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan suatu kebijakan.
5. Dimana suatu kebijakan didasarkan pada hukum, karena memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhi.

2.3. Analisis Kebijakan

2.3.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Cari Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari

peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu:

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
4. Kebijakan dapat bersifat positif dan negatif, dan
5. Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the policy Implementation* (1975). Proses Implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu penjawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja Implementasi Kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai Variabel. Model ini mengandaikan bahwa Implementasi Kebijakan berjalan secara Linear dari keputusan Politik, pelaksana dan kinerja kebijakan politik. Model ini Menjelaskan bahwa kinerja kebijakan

dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan , variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran Kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan diukur dari tingkat keberhasilannya dan juga ukuran dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosio-kultur yang ada dilevel pelaksana kebijakan. Van Meter dan Varn Horn dalam buku subarsono (2011) mengemukakan bahwa untuk mengatur kinerja implementasi kebijakan tentunya menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan , kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tertentu. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang erat kaitanya dengan sikap terhadap para pelaksana. Arah sikap (disposisi) para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang penting. Dalam hal standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan ini nanti akan berisikan tentang kemana arah dan tujuan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini. Sasarannya tentunya untuk membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan berubah dari kehidupan sebelumnya.

2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan merupakan hal yang wajib dalam setiap tahap implementasi. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia terutama sumber daya

Manusia. Dalam hal ini sumber daya ini yang dimaksudkan adalah manusia/masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan tersebut. Sumber daya manusia ini seperti masyarakat penerima bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang sudah ditentukan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menjadi pusat perhatian lembaga pelaksana, yaitu sebagai organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat dan cocok. Karakteristik Organisasi pelaksana ini dimaksudkan dengan para pelaksana program dengan memiliki ciri yang sangat tepat dan cocok dalam kinerja implementasi kebijakan

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksana

Menurut Van Meter dan Varn Horn (2002) agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efisien maka standar dan tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). yang akan bertanggung jawab atas pencapaian suatu standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus diinformasikan pada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana dalam kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan yang harus konsisten dan sama dari berbagai sumber informasi.

Yang dimaksud dengan Komunikasi antar Organisasi ini adalah hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Apakah komunikasi diantara pemerintah dengan masyarakat tersebut sudah berjalan dengan lancar sehingga dapat terjalanya program tersebut dengan lancar dan tanpa halangan.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut Van meter dan Varn Horn (2002), Keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik merupakan pengaruh dari sikap penerimaan atau pendekatan dari agen pelaksana kebijakan. Maksud dan tujuan umum dari suatu standar dan sasaran kebijakan adalah penting. Karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang sukses dapat gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Sikap para pelaksana ini sangat penting dalam implementasi kebijakan dimana para pelaksana ini yang akan menentukan dan mengatur jalannya program. Jika sikap para pelaksana sangat menyepelkan kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir perlu diperhatikan dengan tujuan mengevaluasi kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan Eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan Sosial, ekonomi, politik yang tidak mendukung dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan Sosial, politik, ekonomi dapat juga menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung terjadinya kebijakan.

2.3.2 Analisis Kebijakan Spesifik

Mengingat betapa luas dan beragamnya problematika sosial (*social problems*) yang dihadapi oleh masyarakat masa kini yang mau tidak mau harus direspon oleh pemerintah maka tidak masuk akal jika analisis kebijakan publik itu bersifat homogen. itu sebabnya sebagai respon dari para pakar, dikembangkan lah berbagai pendekatan spesifik dalam analisis kebijakan publik.

1. Pendekatan Proses

Dalam praktik analisis kebijakan, pendekatan yang agaknya paling sering digunakan oleh para ahli ialah yang berupaya mengidentifikasi proses kebijakan. Dari sini, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor penentu dalam setiap tahapannya. Inilah yang dalam banyak keputusan kebijakan publik disebut sebagai pendekatan proses kebijakan (*policy proces approach*). Dalam pendekatan ini, beragam masalah sosial dicoba untuk dikenali sebagai suatu masalah kebijakan yang harus ditindak lanjutin oleh sipembuat kebijakan.

2. Pendekatan Substansif

Dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial jika dibandingkan dengan disiplin-disiplin lain, studi kebijakan publik itu tergolong amat dinamis. Perkembangannya dari waktu ke waktu demikian cepat, sejalan dengan proses perubahan sosial dan beruntunnya beragam isu yang muncul dimasyarakat, yang kesemuanya menuntut perhatian dari pihak pemerintah dan masyarakat sendiri untuk dicarikan alternatif solusinya. Oleh sebab itu ia menuntut kesiapan serta kesigapan kognitif dari para pakar atau analis yang memilih kegiatan ini.

3. Pendekatan Logis-Positivis

Pendekatan Logis-Positivis atau dikenal dengan pendekatan perilaku atau pendekatan Keilmuan umumnya mendukung penggunaan teori-teori, model-model, pengujian hipotesis, pengolahan data mentah metode komparatif, dan analisis statistik kaku yang didasarkan atas logika deduktif. Artinya dengan itu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap konsep inti tertentu yang dipergunakan dalam analisis kebijakan. Misalnya, konsep

semacam implementasi kebijakan harus didefinisikan secara hati-hati dibandingkan dimasa lalu. Kedua, hal ini berarti bekerja dari teori eksplisit mengenai perilaku kebijakan dan menguji teori ini dengan hipotesis-hipotesis. Ketiga, hal ini juga berarti menggunakan data mentah, mengembangkan pengukuran yang bagus mengenai berbagai fenomena dan secara ideal mengamati berbagai penjelasan yang ada sesuai perjalanan waktu.

4. Pendekatan Ekonometrik

Pendekatan Ekonometrik ini dalam Keputusan kebijakan Publik kadang disebut pendekatan pihak publik (*public choice approach*). Pendekatan ini bersandar pada teori atau pendekatan ekonomi yang dipakai untuk memahami masalah politik. Oleh sebab itu ada yang menyebutnya sebagai *economic approach to politics*. Disini, perilaku manusia seluruhnya diasumsikan sebagai "rasional" atau lebih tepatnya dirangsang oleh motif merencanakan keuntungan pribadi. Pendekatan ini berasumsi bahwa orang dalam mengejar kepentingan pribadinya itu tidak memperhatikan apa yang disebut kepentingan kolektif (*collective interest*). Pada dasarnya, pendekatan ini mencoba mengintegrasikan substansi penelitian kebijakan publik dengan metode keuangan publik atau keuangan negara.

5. Pendekatan Fenomenologis (Pasca-positivis)

Sebagaimana sebelumnya telah disinggung, pada tahun-tahun belakangan ini kita melihat timbulnya berbagai reaksi yang mengerucut dalam bentuk ketidakpuasan terhadap penggunaan metode-metode saintifik termasuk pendekatan positivisme logis dan ekonometrik dalam suatu kebijakan publik. Mereka yang menentang pendekatan saintifik mengenai kebijakan publik itu lebih memilih

pendekatan yang mengedepankan intuisi, ketimbang pendekatan positivistik/saintifik. Pendekatan ini menegaskan, para analisis kebijakan perlu menaruh hormat terhadap penggunaan intuisi yang cerdas, yang umumnya diperoleh seseorang melalui proses pengalaman panjang dan karena itu tidak bisa begitu saja diremehkan oleh penggunaan model ,hipotesis,kuantifikasi,data,dan semacamnya.

6.Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif biasa diasosiasikan dengan para pakar generasi masa kini, semisal Peter De Leon dan kawan-kawan.pendekatan ini terkait dengan tantangan pasca-positivis(*post-positivist*) dan melibatkan penyertaan kepentingan dan nilai-nilai yang lebih luas dari beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.gagasan dibalik pendekatan ini agaknya terilhami oleh pikiran dasar bapak ilmu kebijakan Harold Lasswell, tentang apa yang waktu itu disebutnya sebagai *the policy sciences of democracy* (Ilmu-ilmu kebijakan atau demokrasi. Dalam pikiran Laswall itu ,suatu populasi luas para warga negara yang bakal terkena dampak (negatif atau positif) dari kebijakan akan dilibatkan di dalam proses formulasi serta implementasi kebijakan publik via serangkain dialog diskursif.

7.Pendekatan Preskriptif

Ada sejumlah analis yang mengadopsi pendekatan normatif atau preskriptif. Para analis ini memersepsikan dan merumuskan tugas mereka sebagai pencapaian “keadaan akhir” yang diinginkan. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini diinginkan sekaligus dimungkinkan. Mereka sering mendukung posisi kebijakan dan menggunakan cara retorik dengan andal, untuk meyakinkan

orang lain mengenai Faedah posisi mereka. Misalnya, Karya Henry Kissinger, Jaene Kirkpatrick, atau pakar politik lain yang memainkan peran sebagai praktisi.

8. Pendekatan Ideologis

Meskipun tidak semua analisis kebijakan secara eksplisit mengadopsi pandangan liberal atau konservatif, mereka pasti memiliki pandangan semacam itu jauh didasar analisis kebijakan mereka. Thomas Sowell menyebut pendekatan ini sebagai “visi” dan mengidentifikasi dua perspektif yang saling bersaing.

9. Pendekatan Historis

Semakin banyak pakar kebijakan publik yang memalingkan perhatian mereka kepada evolusi kebijakan publik, sejalan dengan waktu. Ketika seseorang mengamati kebijakan publik Indonesia dalam perspektif 50 Tahun atau lebih, seseorang mungkin akan memulainya dengan melihat pola-pola tertentu didalam kontur kebijakan publik yang dulunya tidak dikenal, disebabkan pendeknya jangka waktu analisis. Misalnya, analisis *cross-sectional* atau analisis yang dibatasi oleh satu dekade atau kurang dari itu. Hanya dengan mengamati kebijakan publikn dari kecenderungan periode yang lebih panjang, maka para analisis dapat memperoleh perspektif yang lebih baik mengenai pola-pola yang ada dalam pembuatan kebijakan publi di Indonesia yang masyarakatnya pluralistis ini.

2.4 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal satu tentang perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. rumah sangat berfungsi penting bagi

setiap individu maupun keluarga. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut pula adanya dorongan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dimana dalam pembinaan penyelenggaraan perumahan dan pemukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan untuk menciptakan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini merupakan salah satu program Bantuan Sosial Pemerintah Pusat di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

Yang menjadi Latar Belakang terbentuknya dan munculnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah menjadi tanggung jawab Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan diseluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang penggunaan dana alokasi khusus bidang Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diselenggarakan sesuai dengan prinsip berikut:

- a. Keswadayaan Masyarakat Bantuan yang diberikan Pemerintah Bersifat stimulant dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencakuo kualitas kelayakan rumah supaya dapat dihuni,diperlukan adanya Komitmen dan kesiapan dari masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan maupun aset lain atau tabungan yang bisa dijadikan dana tambahan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pemberdayaan Masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan pelaksanaan yang dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan kegiatannya, dan mengwasi sangat diharapkan partisipasi masyarakat sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab
- c. Transparan, Kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
- d. Dapat dipertanggung jawabkan, kegiatan harus bisa dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat.
- e. Pembanguna mandiri pasca Konstruksi Merupakan kegiatan Swadaya Pembangunan Perumahan setelah selesai program yang dilakukam atas inisiatif dan dengan dana dari masyarakat sendiri.

2.4.1 Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1. Warga Negara Indonesia
2. Masyarakat berpenghasilan rendah(MBR)
3. Sudah berkeluarga
4. Memiliki hak atas tanah
5. Memiliki Rumah tidak layak huni

6. Menghuni rumah yang akan diperbaiki
7. Belum pernah mendapatkan bantuan dari Kementrian PUPR
8. Bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS.

2.4.2 Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan Penerima Bantuan Simulan Perumahan Swadaya adalah:

1. Surat permohonan dari MBR
2. Surat pernyataan yang berisikan:
 - a) Pertama kali menerima bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas rumah dari Kementrian Perumahan Rakyat
 - b) Tanah yang ingin dibangun merupakan tanah milik sendiri dan bukan tanah perkara
 - c) Belum memiliki rumah untuk pembangunan rumah baru atau satu-satunya yang dimiliki untuk peningkatan kualitas rumah
 - d) Akan menempati rumah yang mendapatkan bantuan BSPS
 - e) Foto copy sertifikat hak atas tanah , foto copy surat bukti kepemilikan tanah dari Kepala Desa/Dusun.
 - f) Foto copy Karu Keluarga dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - g) Surat Keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang memiliki penghasilan tetap atau dari Kepala Desa bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

2.4.3. Hukum yang mengatur tentang Program BSPS

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

2. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang penggunaan dana alokasi khusus bidang infrastruktur.
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.5. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih terdahulu mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

no	Nama/fakultas/judul	Metode	Hasil	Perbedaan
----	---------------------	--------	-------	-----------

1	Herlina Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara. Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berobol Kecamatan Bajenis KotaTebing Tinggi.	Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam menyediakan rumah layak huni di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi belum berjalan optimal , termasuk penyaluran BSPS yang belum tepat sasaran, kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang BSPS	Penelitian ini berfokus Kepada Bagaimana Pemerintah dalam Menyediakan rumah yang layak huni
2	Rezky Amaliah (2020) dari Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Halu Oleo. Efektivitas Pelaksanaan Program Bedah Rumah layak Huni bagi Masyarakat penerima Bantuan di Desa Tombekuku , Kecamatan Basala, Kabupaten Konowae Selatan	Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.	Hasil dalam Penelitian ini yaitu Implementasi Pelaksanaan program Bedah Rumah dan Efektivitas Pelaksanaan program bedah rumah layak huni bagi masyarakat penerima bantuan.	Penelitian ini berfokus kepada implementasi dan efektivitas pelaksanaan program Bedah Rumah dan bagaimana peran masyarakat dalam proses pembangunan bedah rumah yang merupakan salah satu bantuan yang di salurkan pemerintah kepada masyarakat.
3	Livander Cornelius Likuyang (2019) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Ratulangi. Efektivitas Program Bedah Rumah di Desa Ranokateng Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara	Metode dalam Penelitian Ini adalah Metode Penelitian Kualitatif Metode Penelitian Ini	Hasil dalam Penelitian ini Efektivitas dari program bedah rumah di desa Ranokateng Atas masih perlu ada pembenahan yang harus dilakukan dari pihak penyelenggara. bentuk dari bedah program bedah rumah ini tidak baik dan tidak diperlukan dikarenakan masih ada pembangunan yang lebih layak seperti pekerjaan jalan , pertanian dan Usaha kecil menengah.	Penelitian ini melihat bagaimana Kelayakan Program Bedah rumah ini apakah sudah Efektif dan layak untuk di Salurkan. Pada Penelitian ini Berfokus kepada apa apa saja yang menjadi

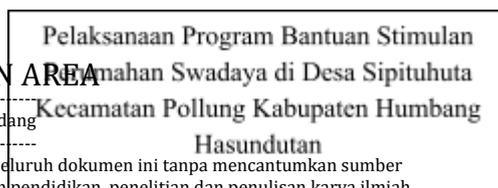
4	Aidin Sutrisno (2014) Universitas Bengkulu. Problematika Bedah Rumah Bagi Masyarakat Penerima Bantuan di Kelurahan Pematang Kota Bengkulu	Menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Teknik Purposive Sampling.	Pada Tahap persiapan Bedah Rumah, penerima merasa terbebani dikarenakan harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan pengajuan penerima bedah rumah, kriteria pengaju penerima bedah rumah tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri dan Undang-Undang yang berlaku.	Problem atau Masalah-Masalah yang ada didalam Pelaksanaan Program Bedah rumah baik masalah yang ada pada penerima maupun penyalur Bantuan tersebut.
---	---	---	---	---

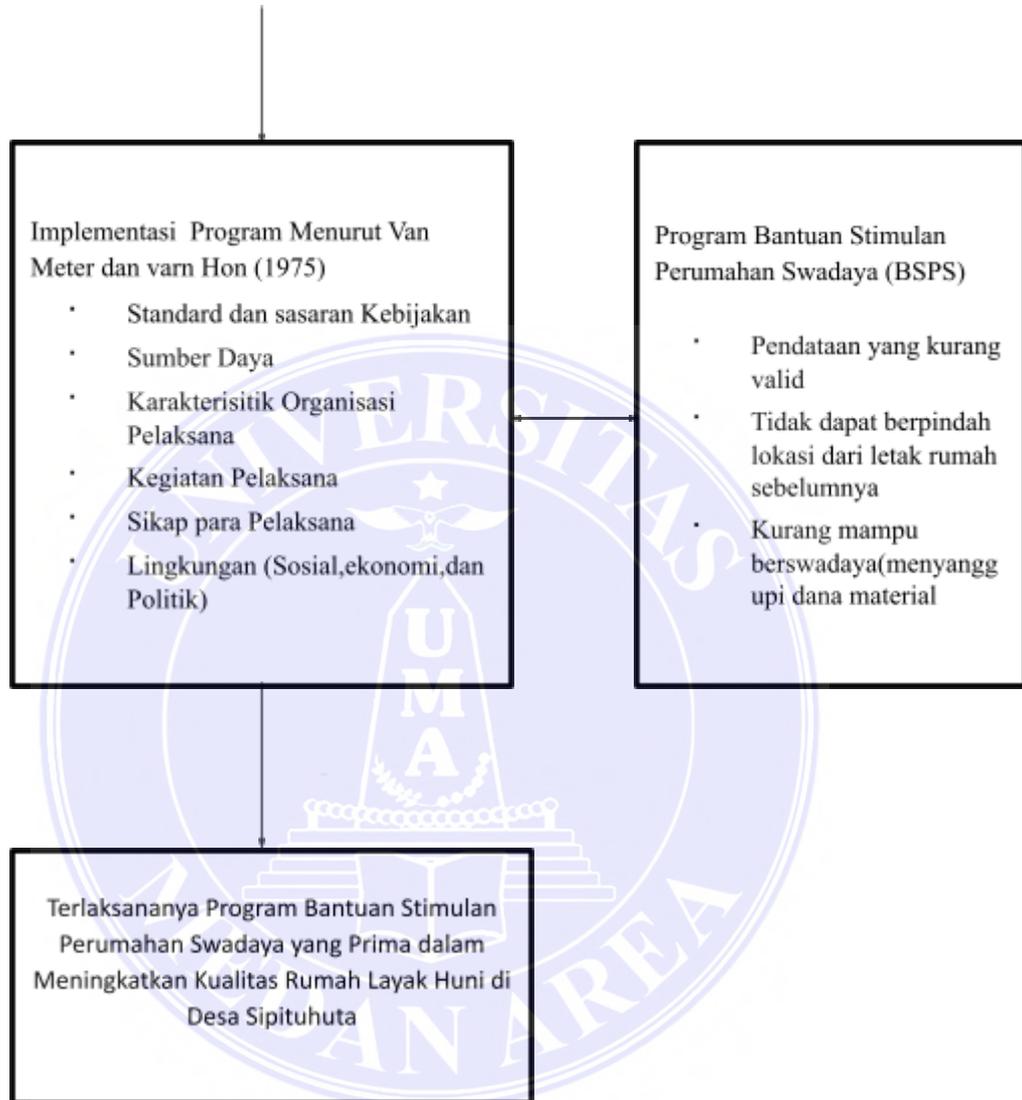
2.6 Kerangka Pemikiran

Pada penyusunan penelitian berdasarkan pada kerangka pemikiran. Secara garis besar pemikiran penulisan ini adalah Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dengan ini Peneliti yang nantinya melakukan penelitian lebih memilih menggunakan teori dari Van meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian (*Performance*). Pada ke 6 variabel tersebut maka akan dapat dilihat apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sudarwan (2003:25) penelitian deskriptif mengungkapkan bahwa dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat suatu keadaan atau wilayah populasi tertentu yang bersifat faktual. Alasan memilih teknik ini dikarenakan pengambian data bisa memberikan hasil yang memuaskan dan ketika satu sumber belum bisa memberikan data yang lengkap peneliti bisa mengambil data dari informan lain.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data-data dan informasi dari tujuan penelitian ini. Dimana peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pemerintah mengatasi kegagalan atau kendala-kendala yang ada dalam proses berjalanya program tersebut, Peneliti juga akan mendeskripsikan faktor yang menghambat berjalanya proses program tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan di tempat tersebut terdapat pola interaksi yang menarik, yakni dengan adanya program bantuan tersebut menimbulkan berbagai masalah bagi warga yang mendapat bantuan program tersebut.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan

		Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agts 2023
1	Pengajuan judul											
2	Penyusunan proposal											
3	Perizinan sempro											
4	Pelaksanaan sempro											
5	Pelaksanaan penelitian											
6	Pengelolaan data											
7	Penyusunan skripsi dan perbaikan skripsi											
8	Seminar hasil											
9	Sidang meja hijau											

3.3 Informan Kunci

Informan adalah anggota kelompok partisipan yang bertindak sebagai pengaruh dan penafsir muatan budaya atau aktor yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2019: 300). yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak terbatas pada wilayah tempat tinggal tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono, 2019: 25). Informan kuncinya yaitu: Ibu Fitri Atmanegara Sinaga, S.T., M.T. Sealaku Pengawas Tata bangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Informan Utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail masalah penelitian yang akan diteliti (Sugiyono, 2019: 25). Informan utama yaitu : Bapak Ungkap Lumban Gaol Selaku Kepala Desa, Desa Sipituhuta, Bapak Sunggul Simon Sinambela Selaku Sekretaris Desa, Desa Sipituhuta, Bapak Dupen Lumban Gaol Selaku Kepala Keuangan Desa Sipituhuta
3. Informan tambahan yaitu orang-orang yang ditentukan di daerah penelitian yang diduga mampu memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019: 25). Informan Tambahan Yaitu Masyarakat Penerima BSPS (3orang) dan Masyarakat yang tidak Menerima BSPS (3orang).

3.4 Sumber Data

Sumber Data dalam Penelitian ini ialah subjek dari mana data itu ditemukan (Arikunto, 2013: 172) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan literatur lain (Moleong, 2005: 157). Peneliti menggunakan dua sumber data dalam memperoleh dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. Sumber yang bukan asli yang dimaksud Amirin disini sebenarnya adalah sumber kedua sebagaimana yang disebut oleh Bungin.

b. Sumber Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang menurut informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud Amirin disini adalah sumber pertama sebagaimana yang disebut oleh Bungin.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Nasution (1998) Menyatakan bahwa, observasi adalah semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda yang sangat kecil (Proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

3.6.2 Wawancara

Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu *wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.*

1) Wawancara terstruktur (Structured Interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informan apa yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview)

Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori *in-dept interveiw*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara

diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview)

Wawancara tidak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3.6.3. Dokumentasi

Menurut Riyanto (2012: 103) Metode Dokumentasi ialah pengumpulan data dengan cara merekam data yang ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. (Sugiyono) 2015: 150) dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan , gambar ,atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dengan cara mengambil foto atau gambar untuk membedakan rumah yang sebelum dibedah dan sesudah supaya dapat memastikan bahwa rumah tersebut nyata dilakukan bedah rumah tersebut.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan , selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1998) menyatakan bahwa “ Analisis telah mulai sejak

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*". Namun dalam penelitian kuantitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throught the investigative process rather than after pricess.* Dalam kenyataanya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

3.7.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan kemudian menuliskanya dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, gambar, dan sebagainya (Miles dan Huberman, 1992: 15-21). Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pengumpulan data adalah mencari untuk mencatat dan mengumpulkan segala sesuatunya secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan yaitu pencatatan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada dilapangan (Sugiyono, 2010: 338). Sama seperti teknik pengumpulan data yang telah dituliskan diatas, maka yang akan dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

3.7.2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merengsum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang dipandang asing tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data

3.7.3 Penyajian Data

Dalam Penelitian Kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “ *the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data , maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi , merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dialami tersebut. “*lookig at dsiplyas help us understand what is happening and to some thing-further analysis or caution on that understanding*”. Miles and

Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan, maka perlu dijawab pertanyaan berikut. Apakah anda tahu, apa isi yang didisplaykan?.

3.7.4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Jika tidak ditemukan bukti-bukti yang nyata dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka simpulan yang sudah dikemukakan bersifat sementara dan tentunya berubah. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid. Kesimpulan yang dibuat harus berkaitan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang telah diperjelas dan dibahas. Penarikan simpulan pada penelitian ini dapat diperoleh dari bukti-bukti nyata yang berkaitan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. bukti-bukti ini juga nanti akan dikembangkan menjadi kesimpulan yang memuat faktor penghambat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya serta upaya Pemerintah dalam mengatasi kegagalan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam proses program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembedahan rumah agar layak huni di Desa Sipituhuta ini Sudah terelesiasikan cukup baik dikarenakan dari keenam Indikator yang Penliti Gunakan Empat Indikator sudah terlaksana dengan baik yakni :

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana sasaran dari program ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu

- b. Karaktersitik Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan Program ini berjalan dengan baik dan efektif karena adanya organisasi/ agen yang ikut serta dalam proses pelaksanaanya. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Sikap para Pelaksana bantuan ini sudah baik dikarenakan pihak PKP dan pihak Pemerintahan desa ikut serta dalam membantu dan mengawasi jalanya program ini.

c. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap para Pelaksana Bantuan ini sudah baik dikarenakan pihak PKP dan pihak Pemerintahan Desa ikut serta dalam membantu dan mengawasi jalanya Program ini.

d. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik tidak Terlalu memengaruhi jalanya program ini dan lingkungan Sosial Ekonomi dan politik juga bisa menjadi sumber informasi terkait Program ini

Namun ada Dua indikator yang belum Terelesiasikan dengan baik yakni:

a. Sumber Daya Finansial

dimana dana Yang diberikan belum cukup untuk memnuhi semua pembelian bahan bangunan dan upah tukang. Hal ini menyebabkan masyarakat penerima BSPS ini harus mampu berswadaya untuk menambah dan yang telah disalurkan oleh Pihak Dinas.

b. Komunkasi Antar Pelaksana

dibatasnya Kuota Penerima Bantuan menjadi problem anantara masyrakat dan pemerintah desa dimana masyarakat merasa diasingkan dan tidak

diprioritaskan oleh pihak Desa dan menganggap pihak Desa mendahulukan keluarga dekatnya.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam pelaksanaan program terdapat beberapa .Pertama, adanya peraturan dari pihak pusat dimana dalam membangun rumah tidak dapat berpindah dari lokasi sebelumnya kecuali bergeser +/- 10m dari lokasi jika terjadi kendala seperti longsor , rawa-rawa dan kendala lainnya. Kedua data yang diberikan pihak desa ke pihak PKP ada yang masih direkayasa,keseuaian data yang diberikan pihak desa ke pihak PKP belum Valid.Ketiga kurang mampunya masyarakat berswadaya untuk menambah dana yang telah diberikan dari pihak dinas.Dengan adanya hambatan ini, mengakibatkan pelaksanaan program BSPS ini sedikit terkendala dan kurang efektif.

a. Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa Sipithuta memberikan data yang valid dan tidak direkayasa supaya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya inidapat terlaksana dengan baik tanpa adanya pengulangan data masyarakat yang bersangkutan.jika data yang diberikan tidak benar maka akan dapat memperlambat proses pelaksanaan program ini
2. Jumlah dana yang diterima masyarakat supaya dipertimbangkan lagi oleh pemerintah,Karena untuk membangun rumah untuk saat ini memerlukan biaya yang besar jadi banyak masyrakat yang kewalahan dan ada yang tidak menerima program ini dikarenakan tidak mampunya untuk berswadaya, jadi

ini bisa diperhatikan oleh pemerintah untuk dana yang diberikan dan membuat jalan keluar untuk masyarakat miskin yang tidak mampu berswadaya.

3. Untuk lebih memperhatikan syarat dan peraturan terkait jarak antara rumah masyarakat yang sebelumnya ke lokasi rumah yang akan dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Said Zainal, (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
_____, (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas , (2012).
Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humarika
- AG. Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustinus, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Anderson, James E. *Public Policy Making*, Newyork: Holt, Renehart and
Wisto. 1979
- Anggara, Sahya, (2014). *Kebijakan Publik: Pustaka Setia*, Bandung
- Arikunto, Suharsimi,(2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Jakarta: PT
- Danim,Sudarwan. 2003. *Ekonomi sumber Daya Manusia*, Jakarta : Pustaka setia
- D.S. Van Meter dan Varn Horn ,(1995).*the policy implementation proces:
A conceptual framework: Ohio:State university*
- Easton, David (1953).*The political system :An inquiry into the state of political
science*,New york:Knopf

- Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods In Social Research*. New York : Mc Graw Hill
- Eyestone, Robert. (1971) *The Thread of Policy; A Study in Policy Leadership*. Indianapolis
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1950). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*.
- Lexy j. Moleong. 2005. *Meodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya:Bandung
- Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. *Psychological Review*
- Miles, and Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, _____ (1984). *Qualitative data analysis*. London: Sage.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998)
- Riyanto, (2012), *Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Penerbit SIC
- Ripley, Rendal B. And Grace A.Franklin , *Policy Implementation and Bureacracy,second edition,theodorey press*, Chiacago-Illionis,2014
- Smith, Mark K. 2009. *Teori Pembelajaran dan Pengajaran*. Yogyakarta: Mirza Media Pustaka.
- Sugiyono, , (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.Bandung: Alfabeta
- Udoji, Chief J.O.,(1981),*The african public sevant As A public policy In Africa*.Addis Abeba: African Association For public administrartion and Management.

Sumber Lainnya

- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang penggunaan dana alokasi khusus bidang infrasturuktur
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
 Herlina, Dewi. *Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) dalaam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Berobol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.Skripsi.*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

LAMPIRAN

Pertanyaan Kepada informan Utama: Pihak dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Fitri Atmenegara Sinaga S.T.,MT	Bagaimana Komunkasi antara pihak Desa dengan pihak PKP ?	Kalau komunikasi kami dengan pihak desa kami rasa cukup baik , kami selalu berkoordinasi dengan desa terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,baik progres maupun kendala yang terjadi di lapangan.
		Apakah sudah ditentukan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan ini?	Dalam Pelaksanaan program BSPS ini ditentukan jangka waktu +-2 Bulan.

		<p>Apa Saja yang menjadi kriteria masyarakat untuk dapat menerima bantuan ini ?</p> <p>Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program ini?</p>	<p>Kalau kriterianya itu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dan belum memiliki rumah yang layak huni , memiliki lahan sendiri dan siap tinggal ditempat yang ingin dibedah</p> <p>Kendala yang kami temui terutama didalam pendataan penerima dan data dari desa seperti ,lahanya tidak lahan sendiri penerima belum berkeluarga dan ada juga beberapa survei yang kami temui rumahnya masih layak huni tetapi diusulkan untuk mendapatkan bantuan ini, ada juga</p>
		<p>Apa Tugas dan tanggung jawab saudara dalam pelaksanaan program ini?</p>	<p>beberapa yang kami temui foto yang kami terima berbeda dengan foto setelah survei.</p> <p>Tugas dan fungsi kami sebagai tim Verifikasi , kami sudah kerjakan sebaik dan semaksimal mungkin , kami tetap terpacu dalam</p>

		<p>Bagaimana Alur pengusulan Penerima program BSPS ini ?</p>	<p>peraturan kementerian PUPR , kami melakukan survei kelokasi dan meminta Data ke Kepala Desa agar pekerjaan cepat terselesaikan dan terealisasi dengan baik.(Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh BP2P, yang terdiri atas unsur BP2P. OPD bidang perumahan dan kawasan permukiman, OPD terkait , Kecamatan, desa Kelurahan,dan tokoh masyarakat lokasi BSPS.</p> <p>Untuk Alur penerimaan Bantuan ini nanti masyarkat Akan di data dari pihak desa atau masyarakat bisa mendaftarkan langsung ke kami, setelah itu kami akan</p>
		<p>Dalam Pelaksanaan Program ini tentu</p>	<p>mengenteri database dan aplikasi dan pihak Kementerian PUPR menerima data usulan dan menetapkan nama-nama calon penerima bantuan ini</p> <p>Untuk sumber daya , Kalau dari kami SDM nya</p>

		<p>dibutuhkan Sumber daya, Sumber daya apa saja yang diperlukan dalam Pelaksanaan Program ini?</p>	<p>pastinya masyarakat penerima bantuan, Kepala Desa, pihak dinas PKP, kalau untuk dananya program BSPS penerima bantuan diberikan dana sebesar 20 juta, dimana dan tersebut dialokasikan 17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah tukang. Dananya disalurkan dalam bentuk uang dalam buku tabungan, dana bantuan ini sumber dananya dari APBN melalui Kementerian PUPR ya bukan dar APBD Kabupaten Humbang Hasundutan.</p>
		<p>Apa Tujuan dan Sasaran Program ini?</p>	<p>Kalau program dan progres dan sasaran kebijakan itu ada didalam surat edaran No 3/SE/PR 2021. Bantuan BSPS ini bantuan dari Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah</p>

			dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
--	--	--	---

Pertanyaan Kepada Informan Kunci : Kepala Desa Desa Sipituhuta dan Pengurus Desa Desa Sipituhua

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Bapak Ungkap Lumban Gaol Selaku Kepala Desa Desa Sipituhuta , Bapak Sunggul Simon Sinambela Selaku Sekretaris Desa Sipituhuta dan Bapak Dupen Lumban Gaol Selaka Kepala	Ada berapa KK dari desa ini yang sudah mendapatkan Program Bantuan Stimlan Perumahan Swadaya ini?	Samapai saat ini ini sudah ada 28 kk yang sudah menerima bantuan ini.

	<p>Keuangan Desa Sipihuta</p>	<p>Berapa Jumlah dana Yang diterima Masyarakat penerima bantuan ini?</p> <p>Apakah ada Masyarakat yang Mengeluh dengan adanya Program ini?</p>	<p>Untuk jumlah dana itu sudah terpatok dari pusat , Masyarakat menerima dana sebanyak 20 juta yang dialokasikan untuk bahan bangunan sebesar 17,5 juta dan 2,5 juta lagi sebagai upah tukang.</p> <p>Kalau keluhan dari masyarakat pasti ada contohnya ada bebera masyarakat yang protes dan menganggap pemerintahan Desa itu dikarenakan dia tidak mendapatkan bantuan ini, tetapi yang sebenarnya itu Kami sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kami semaksimal mungkin , bantuan ini kan dibatasi jadi tidak semua bisa mendapatkan bantuan ini kami memprioritaskan dan mendata masyarakat</p>
--	-----------------------------------	--	---

			<p>yang lebih membutuhkan, tetapi ada beberapa masyarakat yang beranggapan itu ketidakadilan dari pemerintahan desa.</p>
		<p>Apakah ada masyarakat miskin yang sebenarnya sudah layak mendapatkan ini tetapi belum terdaftar dalam calon penerima bantuan BSPS ini?</p>	<p>Kalau masyarakat yang miskin yang belum terdaftar untuk calon penerima bantuan ini tentu ada, tetapi kami tidak bisa berbuat banyak itu dikarenakan bantuan ini kan dibatasi, ada kuota nya jadi kami hanya melakukan pendataan dan kami memprioritaskan atau mendahulukan masyarakat yang paling layak untuk mendapatkannya.</p>
		<p>Tentunya dalam Suatu Program Pasti ada Hambatan Apa Saja Hambatan dalam pelaksanaan Program ini?</p>	<p>Hambatan itu dari masyarakat itu sendiri dimana ada masyarakat yang layak dan ditetapkan sebagai penerima bantuan ini, tetapi pada saat ingin meverifikasi data dari</p>

		<p>Adakah Keluhan / Protes Masyarakat terkait program ini</p>	<p>calon penerima bantuan ini ada masyarakat yang menolak bantuan ini dikarenakan masyarakat itu sendiri tidak mampu untuk berswadaya menambahi dana yang diberikan, jadi untuk Hambatan nya itu ada di Dana untuk berswadaya. Keluhan dari masyarakat tentu ada, seperti rasa cemburu dan beranggapan keluarga mereka di asingkan karena tidak mendapat bantuan ini, kami hanya bisa mengatakan agar lebih bersabar untuk menunggu periode selanjutnya , karena per periode penerima bantuan ini dibatasi jadi.</p>
--	--	---	--

Pertanyaan Kepada Informan Tambahan: Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Masyarakat yang tidak Menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

No	Nama Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	Manorang Lumban Gaol, Latif Lumban Gaol,Nawi Lumban Gaol,Lamtiur Tamba,Serdita Lumban Gaol	Bagaiman Perasaan saudara setelah terdaftar menjadi calon Penerima bantuan ini?	Perasaan kami tentunya senang,karena kami diberi kesempatan dan daiberi biaya untuk merenovasi rumah kami menjadi lebih baik.
		Berapa banyak dana yang Saudara Terima?	Dana yang kami terima itu sebesar 20juta dengan alokasi

		<p>Bagaimana pendapat Saudara terhadap Kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah terkait program ini?</p> <p>Apakah Sudara sudah sanggup berswadaya untuk menambahi dana yang diberikan?</p>	<p>17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah tukang</p> <p>Kebijakan yang mereka terapkan menurut kami sudah baik, karena mereka bersedia mengurus dan membantu kami dalam pengurusan berkas-berkas yang akan kami serahkan.</p> <p>Untuk menambahi dana yang diberikan itu sudah menjadi kewajiban saya setelah saya terdaftar menjadi calon penerima bantuan ini, kalau dari penghasilan saya mungkin tidak cukup di karenakan masih banyak biaya atau kebutuhan sehari-hari yang harus saya tanggung, jadi untuk menambahi dana yang diberikan saya menjuak lahan atau</p>
--	--	--	--

		<p>Apakah Saudari sudah di data pihak desa atau sudah mendaftar menjadi calon penerima bantuan ini?</p>	<p>meminjam uang ke bank.</p> <p>Kalau dari pihak desa kami sudah di data, Mereka juga sudah meminta berkas-berkas seperti KK, KTP tetapi sampai sekarang belum ada info dari pihak desa, pihak desa meminta kami untuk bersabar dikarenakan bantuan ini dibatasi jadi kami disuruh bersabar untuk penerima tahap selanjutnya</p>
		<p>Kenapa Saudara memilih tidak Menerima Bantuan ini?</p>	<p>Saya menolak Bantuan ini karena saya tidak mampu untuk menambahi dana yang diberikan dikarenakan masih banyak nya pengeluaran saya untuk kebutuhan sehari-hari dan tanggungan keluarga.</p>

		<p>Apakah Menurut Saudara Dana yang diberikan itu cukup?</p>	<p>Kalau untuk dana yang diberikan itu tentunya tidak cukup, dikarenakan harga material untuk sekarang ini terbilang mahal-mahal dan upah tukang juga mahal, jadi untuk membangun sebuah rumah itu memerlukan biaya yang terbilang besar, tetapi dengan adanya bantuan yang diberikan sangat membantu dalam perekonomian kami.</p>
--	--	--	--



Data Informan Penelitian

1. Informan Kunci

Nama : Fitri Atmanegara Sinaga S.T.,M.T

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 29 Tahun

Jabatan : Pengawas Tata Bangunan dan Kawasan

Permukiman

Nama : Immaniar Febridayanti Sinaga S.T

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 28 Tahun

Jabatan : Pengawas Tata Bangunan dan Kawasan

Permukiman

2. Informan Utama

Nama : Ungkap Lumban Gaol

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 42

Jabatan : Kepala Desa Desa Sipituhuta

Nama : Sunggul Simon Sinambela

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 45

Jabatan : Sekretaris Desa Sipituhuta

Nama : Dupen Lumban Gaol

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 29

Jabatan : Kepala Keuangan Desa Sipituhuta

3. Informan Tambahan

Masyarakat Penerima Bantuan

Nama : Manorang Lumban Gaol

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 43

Pekerjaan : Petani

Nama : Latif Lumban Gaol

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 59

Pekerjaan : Petani

Nama : Nawi Lumban Gaol

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 44

Pekerjaan : Petani

Masyarakat yang tidak mendapat

Nama : Serdita Lumban Gaol

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 35

Pekerjaan : Petani

Nama : Rindu Tamba

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 52

Pekerjaan : Petani

Nama : Lamtiur

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 42

Pekerjaan : Petani



LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1. Informan Utama

Ibu Fitri Atmenegara Sinaga S.T.,M.T

Pengawas Tata Bangunan Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan



Gambar 2. Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan





Gambar 3. Informan Kunci

Bapak Ungkap Lumban Gaol, Sunggul Simon Sinambela, Dupen Lumban Gaol
Selaku kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Keuangan Desa Sipituhuta



Gambar 4. Informan Tambahan

Bapak Nawi Lumban Gaol Selaku Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya



Gambar 5. Informan Tambahan

Bapak Latif Lumban Gaol dan Istri Selaku Masyarakat Penerima Bantuan BPS

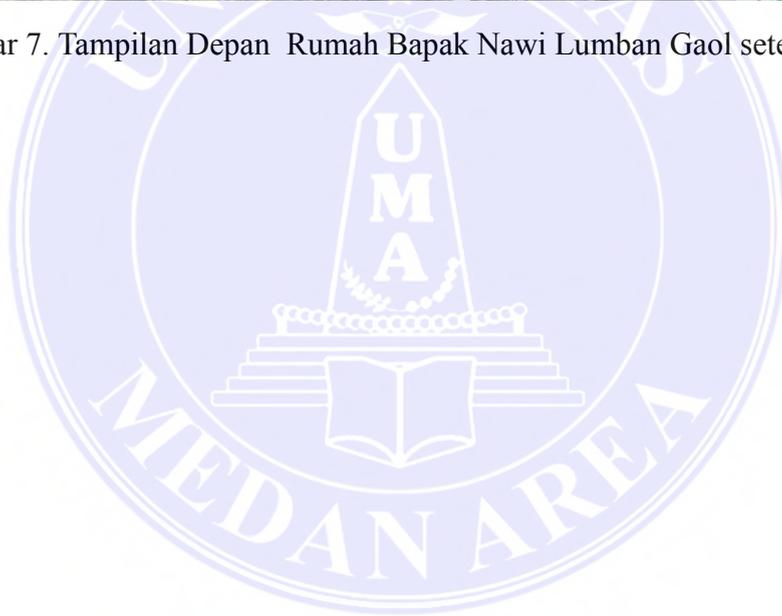


Gambar 6. Informan Tambahan

Bapak Manorang Lumban Gaol Selaku Masyarakat Penerima Bantuan BPS



Gambar 7. Tampilan Depan Rumah Bapak Nawi Lumban Gaol setelah dibangun





Gambar 8. Foto Bersama Bapak Manorang Lumban Gaol dan Tampilan Depan Rumah Setelah Di Bedah



